



Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan

ISSN 2354-6147 EISSN 2476-9649

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah

DOI: 10.21043/fikrah.v6i2.3145

Media Sosial dan Gerakan Sosio-Politik Umat Islam di Indonesia

Firmanda Taufiq

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

firmandataufiq@gmail.com

Lalu Wahyu Putra Utama

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

wahyuputrautama786@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi dewasa ini berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, termasuk wilayah keagamaan. Kemudahan akses informasi tidak berdampak positif atas dakwah Islam tetapi juga digunakan sebagai alat provokatif, sebagaimana yang menjerat Ahok. Tujuan artikel ini untuk mengkaji bagaimana media sosial digunakan untuk menyebarkan berita seputar kondisi umat Islam di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif-analisis dengan mengkaji dan menelaah konten informasi media sosial khususnya berita-berita masyarakat Islam di Indonesia. Implikasi artikel ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas bagaimana media sosial digunakan dalam gerakan sosial politik umat Islam di Indonesia. Adapun hasilnya adalah bahwa media mempunyai posisi strategis dalam menggambarkan, mengkonsep dan memberikan pengaruh atas suatu fenomena masyarakat.

Kata kunci: Media sosial, gerakan politik Islam, penistaan agama

Abstract

Today's technological developments have a broad impact on people's lives, including religious areas. The ease of access to information does not have a positive impact on Islamic da'wah but is also used as a provocative tool, as it ensnares Ahok. The purpose of this article is to examine how social media is used to spread the news about the condition of Muslims in Indonesia. The method used in this article is descriptive analysis by reviewing and examining the information content of social media, especially the news of the Islamic community in Indonesia. The implications of this article are to provide a clear picture of how social media is used in the social and political movements of Muslims in Indonesia. The result is that the media has a strategic position in describing, conceptualizing and influencing a community phenomenon.

Keywords: Social media, Islamic political movements, blasphemy

Pendahuluan

Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan prosentase 87% dari total penduduknya, sebagai penduduk mayoritas secara kuantitatif tetapi umat Islam tidak merepresentasikan makna ke-Islam-an. Meskipun secara sosial model keislaman di negara ini berbeda dengan Islam di negara-negara Timur Tengah yang berwajah “fundamentalis” hingga stereotipe “radikal” (Yoyo, 2011). Islam di Indonesia disebut sebagai “*Islam with a smiling face*” dikarenakan lebih moderat, beriringan dengan demokrasi, menjunjung tinggi pluralitas dan multikulturalisme serta menjunjung setiap hak pemeluknya secara merata (Burhanudin & Dijk, 2013, hal. 25).

Representasi Islam di Indonesia tersebut telah melahirkan berbagai macam corak praktis yang berbeda-beda sebagaimana yang dikaji oleh Michael Laffan yang diikuti oleh Harisudin (2017, hal. 531) berusaha mengkaji komunitas Islam pada abad 19 hingga 20. Ia menyebutnya sebagai “Islam Jawi” yang merujuk pada sebuah identitas Muslim yang belajar di Mesir dan Mekkah. Adapun sarjana Indonesia yang paling dikenal di Indonesia adalah Abdurrahman Wahid (Pribumisasi Islam) dan Nurcholis Madjid sebagai pionir “Islam Indonesia”, tetapi bagi Faridl (2003) corak keislam di Indonesia diwakili dengan dua wajah yaitu sosioreligius yang diwakili NU dan Islam modernis yang diwakili Persis. Meskipun masih banyak lagi para sarjana yang berusaha mengkaji Islam di Indonesia baik dari berbagai pendekatan. Perbedaan itu disebabkan oleh pemahaman setiap pemeluknya dan faktor eksternal yang datang dari proses masif penyebaran budaya dan modernisasi. Oleh sebab itu, Islam dalam dataran praktis

memiliki dua konsep, pertama Islam Populer (*popular Islam*) dan Islam literalis (*literalist Islam*) atau Islam skripturalis (*scripturalist Islam*).

Islam populer merujuk pada sebuah populasi atau masa sebagai lawan dari pola ortodoksi. Karakteristik Islam populer ini adalah perkembangan media massa, masyarakat kota, kosmopolitan, secara simultan dipengaruhi oleh budaya Barat, pola Islam di Timur Tengah dan corak lainnya. Adapun Islam skripturalis memiliki makna doktrin pembacaan literalis dari teks suci al-Quran dan al-hadis (Weintraub, 2011, hal. 3). Corak Islam populer pada kenyataannya mendorong pemeluknya mampu bersinergi dan berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Refleksi ke-Islaman setiap individu dan kelompok tidak hanya direpresentasikan dalam *scope* yang sederhana, melainkan telah mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Menurut Zaeny (2005, hal. 155) perubahan pada masyarakat terjadi melalui pengenalan unsur-unsur baru. Unsur-unsur baru ini diperkenalkan kepada masyarakat dalam dua cara, yaitu dengan penemuan baru (*invensi*) yang terjadi dalam masyarakat itu dan masuknya pengaruh masyarakat lain.

Kemajuan teknologi sebagai ciri globalisasi tidak hanya berdampak pada budaya masyarakat setempat melainkan telah mengubah perilaku dan cara beragama yang lebih maju. Seorang Muslim yang ingin mengetahui kaidah agama, maka dia tidak lagi belajar bertanya langsung melalui kiai atau ustadz, atau seorang pendakwah tidak hanya sebatas di masjid-masjid saja, kita sudah bisa mencari jawaban melalui konten-konten kajian Islam dari berbagai media. Begitu juga dengan dakwah, melalui media sosial kita dapat menyebarkan informasi seputar Islam dan dilihat oleh masyarakat secara luas. Segala ruang kehidupan masyarakat saat ini sangat erat kaitannya dengan media sebagai sumber informasi dan komunikasi satu dengan lainnya. Pada wilayah ini, terdapat disrupsi dan perpindahan otoritas dari seorang pada media atau dalam kajian agama dari Tuhan kepada manusia yang harus menjadi perhatian khusus dalam beragama (Muhtador, 2018).

Penggunaan media sosial sebagai prosentase terbesar mendorong terjadinya perubahan sosial. Penggunaan media sosial akan berdampak positif bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, bisnis, dakwah, pendidikan, ekspresi pemikiran dan opini

serta membaginya kepada orang lain (Putri, 2016). Media mempunyai kelebihan 5 kelebihan dibanding dengan media konvensional, sehingga dapat menjadi power untuk menggiring isu-isu sensitif (Pamungkas & Zuhroh, 2016).

Pada akhir 2016 masyarakat Indonesia dihadapkan pada persoalan sosial-keagamaan yang berkaitan dengan politik. Persoalan itu terjadi ketika gubernur Jakarta Ahok saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka yang kemudian dianggap menghina agama. Pada bulan Oktober, Buni Yani mengunggah video rekaman pidato itu di akun facebooknya, berjudul “Penistaan terhadap Agama”. Berita-berita terkait kasus ini tesebar secara luas di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dari media masa dan elektronik, namun berita-berita tentang isu-isu yang berbau agama tersebar pada berbagai media sosial, seperti facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya (Muh Kamim, 2017). Masifnya antusiasme masyarakat Islam pada saat itu menunjukkan bahwa isu-isu agama masih sangat sensitif pada masyarakat Indonesia. Banyak kalangan kemudian melihat kasus ini adalah murni politik, dimana sebagian kalangan memandang momen ini adalah waktu untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu agama.

Peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Amin Mudzakkir mengatakan:

Dengan dibawanya isu (Ahok) ini dibawa ke ranah hukum, ini tidak bisa ditutupi bahwa ini hanya kepentingan politik Pilkada, kalau ini benar masalah agama bisa diselesaikan dalam forum ahli agama.

Ubedilah Badrun juga mengatakan bahwa: polemik kasus Ahok tidak bisa dilepaskan dari adanya pertarungan politik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak DKI. Isu SARA atau toleransi secara jelas digunakan oleh elit untuk kepentingan kekuasaan dan memperkeruh suasana Pilkada (Hutabarat, 2017).

Paparan tersebut, menampakkan persoalan yang berkaitan dengan umat Islam sejak 2016 hingga 2017 terkait persoalan keagamaan yang dibawa ke ranah politik. Pergerakan umat Islam yang begitu masif didorong oleh penyebaran sosial media. Menurut Izad (2017, hal. 182) media menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas desakan penegakan hukum bagi Ahok yang dianggap sebagai penista agama, sehingga terjadi demo besar yang berjilid-jilid. Artikel ini akan mengkaji bagaimana pergerakan

sosial dan politik umat Islam yang dipengaruhi oleh media sosial. Demo 4 November 2016 yang telah dilalui berjalan dengan damai. Umat Muslim yang menuntut Ahok atas penistaan agama dilakukan dengan tidak anarki. Namun, yang terjadi pada akhir demo (lewat dari pukul 18.00) ialah terdapat provokasi-provokasi yang menyebabkan kericuhan. Jika memang provokasi yang dilakukan adalah sengaja untuk membuat konflik, maka jelas bahwa demo dijadikan media (Octaviani, 2017, hal. 67). Permasalahan yang sesungguhnya ialah apakah konflik yang dibuat atas dasar dugaan penistaan agama oleh Ahok ataukah ada maksud lain dari konflik tersebut.

Tujuan dari artikel ini adalah mengkaji fenomena keagamaan yang terjadi dalam rentang waktu 2016-2017. Peristiwa tersebut dianggap banyak kalangan sebagai titik balik dan persatuan umat Islam. Namun, peristiwa tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pesan bahwa pergerakan umat Islam sangat dipengaruhi oleh berita-berita dan konten-konten media sosial. Artikel ini juga diharapkan dijadikan sebagai gambaran tentang bagaimana pergerakan umat Islam dalam konteks media, dan pergerakan politik.

Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif, proses artikel dilakukan berdasarkan analisis informasi yang ada. Artikel ini menitikberatkan pada aspek pengamatan berbagai informasi yang mendukung dalam artikel ini. Pengamatan dilakukan pada berbagai fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan pergerakan umat Islam terkait dengan isu keagamaan yang dianggap sebagai kepentingan status kekuatan politik dan bagaimana peran media sosial dalam menyebarkan berbagai opini dan isu agama. Objek yang akan diteliti dalam artikel ini adalah peran media sosial dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan sosial umat Islam di Indonesia pada 2016 hingga 2017. Artikel ini melihat aspek pergerakan politik yang menandai adanya sentimen politik yang diperjuangkan oleh kelompok “pro pemimpin Muslim”. Masifnya pergerakan umat Islam di Indonesia pada waktu itu.

Media Sosial

Masyarakat pada dunia digital dan dianggap sebagai dunia tanpa batas, tidak sebatas melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, melainkan mampu melakukan komunikasi dengan teman bahkan rekan yang di luar negeri. Setiap individu hari ini secara intens mampu berinteraksi secara informal dan mengikuti serta menyaksikan berbagai kegiatan diseluruh dunia (Mahoney & Tang, 2017, hal. 7–8). Banyaknya perangkat teknologi termasuk didalamnya adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi atau jejaring sosial. Perkembangan perangkat teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah seluruh lapisan masyarakat untuk menyambung silaturahmi, karena melalui media komunikasi hubungan antar sesama akan menjadi lebih dekat. Media untuk melakukan komunikasi dalam kondisi seperti sekarang ini banyak menyuguhkan pilihan yang menarik. Pemanfaatan media komunikasi ini dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dalam bentuk berita atau pesan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (Saputra, 2016).

Adapun media komunikasi yang sering digunakan saat ini adalah jejaring sosial atau media sosial. Sosial media dapat didefinisikan sebagai sebuah media *online*, dengan penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wikipedia, forum dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wikipedia merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaksi (Cahyono, 2016). Sementara Kaplan dan Haenlein (2010, hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan media sosial sebagai sebuah grup internet yang didasarkan pada sebuah aplikasi dengan Wev.2.0 yang bisa membuat dan mempertukarkan “*user-generated content*”. Media sosial bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada *audience* atau pembaca melalui pesan atau konten media. Sosial media secara fundamental yang mengubah cara yang menyaksikan membuat keputusan tentang tindakan sehari-hari, melainkan memaksimalkan kesempatan bagi pelaku pasar untuk melakukan interaksi dengan para konsumen (Mahoney & Tang, 2017).

Definisi yang lebih spesifik dijelaskan oleh Rahmad (2009), media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi dan media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Setiap orang bisa mengakses media sosial dan mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya, media sosial mulai tampak menggantikan peran media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita (Saputra, 2016). Kelebihan dari penggunaan media sosial ini dikarenakan penggunaan jaringan yang tidak membebankan biaya, serta kita bisa mengedit, menambahkan, dan memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis dan berbagai konten lainnya.

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung dengan internet 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet (Fatimah, 2018). Adapun penggunaan internet di Indonesia pada kategori 20-24 tahun ditemukan sekitar 22,3 juta jiwa atau setara dengan 82 % dari total kelompok tersebut. Sedangkan pada kelompok 25-29 tahun, terdapat 4 juta pengguna internet atau setara 80 %. Temuan ini didukung dengan diketahuinya profesi mahasiswa sebagai profesi yang paling banyak menggunakan internet ketimbang sektor lain. Kedua kelompok usia itu meninggalkan jauh kelompok usia lainnya yakni kategori usia 30-34 tahun dan 35-39 tahun. Media sosial merajai konten internet sebagai yang paling sering diakses netizen. Tercatat 97,4 % orang Indonesia mengakses akun media sosial saat menggunakan internet (Sugiharto, 2016).

Social Movement

Pendekatan awal dalam mempelajari gerakan sosial berasal dari fungsionalisme tentang perilaku masa. Pijakan awal pendekatan ini adalah sebuah asumsi adanya sistem keseimbangan (*system equilibrium*) yang berada pada kondisi alami. Dari perspektif ini, masyarakat secara organik menghasilkan infrastruktur kelembagaan yang mengatur

keseimbangan antara input dan output sistem politik. Setiap tuntutan masyarakat diakomodasi oleh lembaga yang bertanggungjawab atas berbagai kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang optimal. Kebijakan inilah yang pada gilirannya meredakan tuntutan dan fungsi dalam menjaga keseimbangan tersebut. Namun, apabila terjadi ketidakseimbangan sistem yang berasal dari kekacauan struktural maka akan menghasilkan keluhan baru, menghasilkan disfungsi patologis yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Jika kapasitas kelembagaan tidak dapat mengakomodasi masyarakat maka hasilnya adalah frustrasi sosial dan kekacauan politik (Wiktorowicz, 2004, hal. 6). Oleh sebab itu, model klasik dari teori gerakan sosial ini secara spesifik menjelaskan tentang hubungan penyebab linear yang pada gilirannya menghasilkan tindakan kolektif. Akibat dari sebuah ketegangan atau kondisi tertentu seperti industrialisasi, modernisasi, krisis ekonomi, keadaan sosial yang bermasalah.

Mario Diani (2000) menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan proses sosial tertentu yang terdiri dari mekanisme di mana setiap aktor terlibat dalam tindakan kolektif yang didasarkan pada beberapa hal, yaitu terlibat dalam hubungan konflik dengan lawan yang teridentifikasi dengan jelas dan berhubungan dengan jaringan informal yang padat dan adanya identitas kolektif yang berbeda. Aktor gerakan sosial biasanya terlibat dalam konflik politik atau budaya dengan maksud untuk mempromosikan atau menentang suatu perubahan sosial, dengan konflik, hubungan oposisi antara aktor yang mencari kontrol atas kekuatan politik, ekonomi dan budaya dan dalam prosesnya membuat klaim negatif antara satu dengan lainnya. Dengan demikian dalam konteks ini, gerakan sosial erat kaitannya dengan sebuah dukungan atas beberapa nilai atau prinsip moral dan tidak secara otomatis sesuai dengan tindakan gerakan sosial dan dapat diartikulasikan dengan kepentingan sosial dan politik.

Kasus Penodaan Agama dan Lingkaran Politik

Pada beberapa waktu yang lalu, salah satu media asing Aljazeera melakukan wawancara dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Headline berita tersebut adalah "Joko Widodo": *Islam in Indonesia is moderate*. Ada beberapa poin menarik dalam wawancara tersebut salah satunya ketika wartawan bertanya: seberapa pedulihkah anda? Kita telah menyaksikan ratusan ribu orang yang turun ke jalan dan banyak orang

yang terdorong menuju Jakarta untuk memilih kandidat Muslim, banyak orang yang mengatakan, *we had no choice but to vote for a Muslim?* Presiden kemudian mengatakan:

This is not about minority versus majority, once again, this is about politics... Even though the demonstrations were large, they were peaceful ... If there is a topic to be blown up, it will be done. If there is an issue that needs to be pushed, it will be pushed (Al Jazeera, 2017).

Wartawan kemudian bertanya, "Apa yang kita lihat saat ini adalah versi Islam yang lebih konservatif dan lebih populer di Indonesia? Seberapa jauh perhatian anda dan apa yang akan anda lakukan untuk menghentikan hal tersebut? Presiden kemudian dengan tegas bahwa: "Isu-isu seperti itu datang selama proses pemilihan" hal itu nampak pula diseluruh wilayah Indonesia, isu seperti itu jelas tidak benar. Islam di Indonesia adalah Islam yang toleran, Islam di Indonesia adalah moderat, dan kami akan selalu dorong keberlangsungan tersebut, itulah keragaman, pluralisme di Indonesia akan terus berlanjut dan akan berkembang dan terus meningkat dan akan menjadi lebih baik dan lebih baik".

Percakapan tersebut merupakan representasi dari kondisi yang dihadapi oleh rakyat Indonesia pada akhir 2016. Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan pernyataan mantan Gubernur Jakarta Ahok dalam sebuah lawatannya yang sempat menyinggung ayat al-Quran. Isu-isu tentang agama di Indonesia memang sangat sensitif, kita tahu bahwa umat Islam di Indonesia memiliki sentimen tinggi terkait dengan isu-isu keyakinan.

Pada 4 Oktober 2016, Buni Yani (selanjutnya disingkat BY) menggugah cuplikan video pernyataan eks Gubernur Ahok saat bertugas selaku Gubernur DKI Jakarta di kepulauan Seribu. Dalam video tersebut menyitir surat al-Maidah ayat 51, cuplikan yang diunggah BY dengan cepat viral di media sosial, postingan tersebut berjudul "Penista Terhadap Agama?"

Gambar satu menarasikan tentang postingan BY yang telah dilihat lebih dari 185 ribu kali dan dibagikan 8.916 kali. Berita tersebut kemudian dengan cepat menyebar dan menjadi berita *headline* diseluruh media di Indonesia. Gejolak opini yang membludak

di media ini kemudian masyarakat secara serentak, baik itu kalangan kiyai, ulama, dan masyarakat mengambil bagian dan merasa bertanggung jawab dan menuntut agar “Penista Agama” diperiksa dan dihukum.

Selain menyebar di media sosial, organisasi Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dikatakan sebagai aktor keberhasilan dalam menyatukan masa. Tujuh hari kemudian, ketua umum MUI Ma’ruf Amin menyatakan sikap terkait kasus yang terjadi di Kepulauan Seribu yang mengutip surat al-Maidah ayat 51. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian menyampaikan sikap keagamaan atau fatwa yang menyatakan sebagai berikut, *pertama*, bahwa al-Quran QS. al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. *Kedua*, ulama wajib menyampaikan isi surat al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib.

Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. *Keempat*, menyatakan bahwa kandungan surat al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk menodaan terhadap al-Qur’an. *Kelima*, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan ulama dan umat Islam.

Menurut Hamzah (2017) fatwa MUI juga menjadi salah faktor yang menyulut gerakan umat Islam untuk menuntut dipidana, karena kedudukan pendapat dan sikap keagamaan dalam kelembagaan MUI merupakan keputusan yang paling tinggi. Oleh sebab itu sikap MUI dalam menanggapi al-Maidah ini kemudian ditanggapi secara masif oleh umat Islam, sehingga melahirkan gerakan demonstrasi yang bertajuk “Aksi Bela Islam” yang dilakukan Habib Rizieq Pimpinan FPI pada tanggal 14 Oktober 2016.

Sehari sebelumnya, ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq berbicara secara lantang mengatakan:

MUI sudah berfatwa bahwa Ahok telah nistakan Islam dan nodai al-Quran, serta hinakan ulama dan lecehkan ummat, sehingga harus diproses secara hukum (Fadhil, 2017).

Aksi ini merupakan kali pertama yang menuntut agar Ahok agar segera diproses secara hukum. Aksi Bela Islam ini secara serentak diikuti oleh beberapa elemen organisasi diantaranya FUI, GPII, KB-PII, Majelis Az-Zikra, AQL Center, Hamas Tanabang, FBR, Forkabi, Forum Komunikasi Alumni Afganistan Indonesia (FKAAI), Jamaah Anshar Syari'ah (JAS). Taruna Muslim, Hidayatullah, Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Bela Negara (Bilal, 2016). Aksi Bela Islam I diakui oleh golongan Islam radikal sebagai momentum sebagai membangkitkan semangat dan sentimen agama. Semua organisasi-organisasi daerah dan Islam kemudian meleburkan diri dan tergabung dalam barisan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang dipimpin oleh Bakhtiar Natsir serta tokoh-tokoh FPI lainnya. Di lain pihak, fenomena tersebut juga yakini sebagai pemulihan nama baik FPI terutama dalam memperbaiki citra yang dianggap radikal dan mempunyai citra negatif di publik. FPI yang dikenal sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan kerap kali melakukan aksi kekerasan, melegalkan aksi kekerasan dalam melakukan aksi-aksi mereka yang dianggap bertentangan dengan moral. Mereka selalu mengatasnamakan Tuhan dalam melakukan justifikasi terhadap suatu persoalan (A.Ugur & Ince, 2015, hal. 35).

Adanya GNPF-MUI sebagai sebuah gerakan yang merepresentasikan persatuan umat. Wacana dibentuknya organisasi ini adalah menjadi penggerak masa dan menjadi representasi persatuan umat Islam. Aksi Bela Islam jilid II hingga sebagai puncak dari gerakan umat Islam. Keberhasilan mengerahkan masa ini dipengaruhi oleh beberapa hal, *pertama* media sosial, pada waktu lalu selalu ramai diperbincangkan terkait dengan kasus penistaan agama dan persatuan umat Islam. *Kedua*, keberhasilan gerakan ini didukung dengan adanya pemikiran yang searah dari para kiai yang memiliki basis masa yang banyak.

Pimpinan Majelis Taklim az-Zikra, KH. Arifin Ilham, Abdullah Gymnastiar, dan deretan tokoh Muslim yang terkenal dan memiliki pengikut dan basis masa banyak. Ajakan inilah yang menyebabkan bersatunya umat Islam. Hingga aksi puncak dengan masa terbesar sejak reformasi, Aksi Bela Islam III adalah representasi persatuan umat

Islam yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pesan politis kepada masyarakat. Laporan dari GNPF-MUI melaporkan estimasi jumlah peserta yang mengikuti aksi damai mencapai 7, 5 juta orang. Adapun seruan aksi ini ialah untuk secepat menghukum Ahok karena dianggap telah menistakan al-Quran yang diyakini sebagai kitab otoritatif bagi umat Islam.

Digitroops merilis Haris risetnya terkait isu-isu populer di media sosial Indonesia sepanjang tahun 2016. Kasus Ahok dan Aksi Bela Islam didaulat menjadi isu nomor 1 paling populer. Kasus Ahok dan Aksi Bela Islam dengan segala variannya mencapai 179.852.000 entri dalam mesin pencarian Google. Total berita terkait dua isu sebanyak 5.730, dan menjadi trending topik di twitter dalam 25 hastag dan kata kunci. Di Facebook, tema ini juga menjadi pusat perdebatan dalam tiga bulan terakhir. Chief Executive Officer Digitroops, Fahd Pahdie mengatakan, kasus ini secara khusus berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Baik dalam proses hukum kasus penistaan agama oleh Ahok dan penggugah video oleh Buni Yani, pelaksanaan dan penanganan Aksi Bela Islam oleh aparat negara, serta berpengaruh pada langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Kerap kali percakapan di media sosial bisa mendorong, mempengaruhi, dan mengubah kebijakan publik tertentu. Media sosial atau internet sekarang sudah menjadi *battle ground of politics*, bahkan saat ini internet dan media sosial memiliki pengaruh yang sangat nyata dalam proses-proses demokrasi (Lova, 2016). Gerakan Aksi Bela Islam mengguncang arah politik di Indonesia dan ketika Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dikalahkan dalam pemilihan gubernur. Kekalahan Ahok mengejutkan mengingat popularitasnya 75 % memilihnya karena hasil kerja nyata selama menjabat. Menurut Agie (2018) bahwa kekalahan Ahok disebabkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka. Pemerintahan terbuka yang mendorong transparansi dengan mekanisme keterbukaan sejak bawaan (*open by default*) ternyata memiliki efek pedang bermata dua. Ketika Ahok tidak melakukan penyortiran seksama pada diseminasi informasi, terutama hal-hal yang cenderung sensitif, hal tersebut akan memicu gejolak publik yang meresahkan. Alih-alih meningkatkan kepercayaan publik, keterbukaan malah membuka celah sehingga dimanfaatkan kubu oposisi dalam melakukan manuver politik. Inovasi keterbukaan yang dimaksudkan untuk membuat agenda pemerintah menjadi se-

transparan mungkin justru berbalik menjadi bumerang yang telak terhadap kubu petahana. Bagi Danny (2014) semakin proses demokrasi terbuka, setiap individu dan kolektif dari pelaku politik harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang memadai di depan publik dan di media, sehingga tidak menjadi bomerang, seperti kasus yang menjerang Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama dijatuhkan vonis hakim setelah berkomentar tentang ayat al-Quran. Setelah pengadilan memvonis hukuman dua tahun penjara karena sebuah komentar yang dia buat dalam pidatonya yang menyebutkan sebuah ayat dalam al-Quran yang berisi tentang larangan dalam memilih pemimpin non-Muslim. Para pengamat politik memberikan gambaran bahwa peristiwa demonstrasi masif tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, terkait dengan agama dan etnisitasnya. Beberapa artikel mengemukakan bahwa Ahok akan sulit memimpin Jakarta karena etnisnya. Namun, artikel lebih baru mengemukakan adanya segmentasi dari para pemilih dan mendukungnya tapi memilih diam disebabkan adanya motivasi religius dimana mendorong mereka untuk memilih pemimpin Muslim. Maka, kasus yang melibatkan mantan Gubernur Jakarta memberikan pandangan bahwa Islam sebagai sebuah identitas politik dan bukan sebagai platform siritual yang tampaknya semakin memobilisasi keuntungan politiknya. Terdapat banyak kelas menengah yang banyak berkembang di Indonesia serta pada umumnya partai-partai Islam di Indonesia sedikit yang memilih partai Islam. Mereka cenderung lebih memilih parta-partai yang kompeten.

Marcus Mietzner mengemukakan bahwa agama memiliki peran penting dan kampanye-kampanye selalu berfokus pada identitas dan agama:

“We think that the evidence points overwhelmingly to a critical role for religion, and a campaign that focused on Ahok’s ethnic identity as both a Chinese Indonesian and a Christian. This argument was laid out most clearly” (Eve Warburton, 2017).

Bahkan Brennan mengatakan sangat sulit melihat isu “penistaan agama” selain dari motif politik untuk memenangkan kelompok Islam garis keras dan kepentingan elit politik semata.

“It’s hard to see this for anything other than what it appears — a politically-motivated sentence to appease hardline Islamists groups and politicians with a vested interest in seeing Ahok’s political career go up in smoke,”(Ming, 2017).

Pada baru-baru ini terdapat studi politik dan agama, Jeremy Menchik menyebutnya sebagai *“calls this tolerance without liberalism”*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa situasi di mana keragaman itu ada dan dihargai secara tulus dan tidak harus mengancam tatanan sosial. Tidak mengherankan, banyaknya kaum progresif di Indonesia, kaum liberal dan minoritas keagamaan menemukan sebuah sistem yang mengkhawatirkan. Walaupun Indonesia menjadikan UUD 1945 sebagai dasar negara dan dilaksanakan pemilihan secara damai dan demokratis. Ini berimplikasi bahwa mayoritas harus menghormati. Dengan cara ini, kasus Ahok mungkin terbukti memiliki implikasi jangka panjang tidak hanya memiliki implikasi jangka panjang tidak hanya untuk komunitas non-Muslim di Indonesia, tapi juga untuk mayoritas Muslim.

Oleh sebab itu, kasus penghinaan tersebut tampaknya telah melampaui batasan-batasan dalam arti mempertahankan kesucian agama. Beberapa orang yang memprotes melawan Ahok merasa frustrasi dengan investigasi yang dilakukan penegak hukum dalam melakukan investigasi terhadap Ahok. Aksi Bela Islam nampaknya hanya sebagai penggerak politik dan diselimuti oleh sentimen agama. Politik demikian memunculkan masalah baru dalam aspek keamanan sosial, politik dan budaya masyarakatnya. Fenomena yang bisa dianggap sebagai sebuah paradoks dalam demokrasi telah wujud dalam proses demokrasi di beberapa daerah di era otonomi daerah saat ini. Etnis dan agama sebagai salah satu kategori sosial kemudian berkembang menjadi bagian terpenting dari identitas politik, dan bahkan simbol dan kategori sosial tersebut seringkali menjadi dasar legitimasi dalam persaingan politik di daerah. Maka munculah kemudian apa yang saya sebut sebagai politik etnik (Kristianus, 2016). Gerakan politik umat Islam dihadiri oleh para tokoh dan para elit politik dan melakukan pendekatan kepada para pemimpin GNPF-MUI untuk memberikan pandangan positif bahwa mereka membela momentum persatuan umat tersebut. Pergerakan para tokoh politik ini sebagai pendekatan yang memiliki kepentingan terhadap mayoritas agama dan untuk keuntungan politik (A’yun, 2016). Hal tersebut menjadi sebuah dinamika penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, media sosial tidak hanya difungsikan

sebagai alat hiburan ataupun komunikasi semata, tetapi lebih dari itu, media sosial mempunyai daya kuat dalam memberikan dorongan dan pengaruh atas sebuah kebijakan publik, yang berimplikasi pada masyarakat secara luas.

Simpulan

Media sosial sesungguhnya mempunyai peranan penting dalam struktur kehidupan bernegara, bermasyarakat maupun bernegara. Media sosial bergerak secara massif, baik dari masyarakat akar rumput (*grass root*), tetapi juga hingga tingkat atas. Kondisi ini menjadi potensi luar biasa, bahwa media sosial adalah alat penggerak dan katalisator yang vital bagi suatu tatanan sosial masyarakat. Gerakan-gerakan sosial ataupun keagamaan merupakan target dan sasaran yang mudah untuk diangkat ke permukaan hingga permasalahan tersebut menjadi headline media nasional. Hal ini kemudian menjadi fenomena atas respon masyarakat yang berbeda-beda dalam menyikapi dan mengomentari permasalahan tersebut, sesungguhnya akan berimplikasi pada stigma dan dugaan yang belum tentu kebenarannya. Maka, timbullah perbedaan tafsir atas permasalahan yang diangkat, sehingga timbul konflik ataupun *chaos* antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, meski belum ada *tabayyun* terlebih dahulu untuk menemukan akar permasalahan dan solusinya. Media sosial seharusnya dapat dimaksimalkan untuk media komunikasi dan menjadi jembatan antara satu orang dengan yang lain, tidak disalah gunakan dalam mengakomodir dan memecah belah atas nama ideologi dan kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan perpecahan dan konflik yang berkepanjangan.

Referensi

- A.Ugur, M., & Ince, P. (2015). Violence in the Name of Islam: The Case of Islamic Defenders Frony from Indonesia. *TURKISH JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS*, 14(1).
- A'yun, R. Q. (2016). Politics Complicate Blasphemy Investigations in Indonesia and around the world.
- Al Jazeera. (2017). Joko Widodo: Islam in Indonesia is moderate.
- Andreas, K., & Michael, M. H. (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media." *Business Horizons*, 53(1).
- Bilal. (2016). Ratusan Ribu Umat Islam Gelar Aksi Bela Islam Ganyang Ahok.
- Burhanudin, J., & Dijk, K. van. (2013). *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretation*. Amsterdam: ICAS,), hlm.25.: ICAS.
- Cahyono, A. S. (2016). Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *PUBLICIANA: Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tulungagung*, 9(1), 140–157.
- Diani, M. (2000). Social Movement Networks Virtual and Real. *Information, Communication & Society*, 3(3).
- Eve Warburton, L. G. (2017). Class Dismissed? Economic Fairness and Identity Politics in Indonesia. *Jurnal New Mandala*, 5(1).
- Fadhil, H. (2017). Habib Rizieq: Ahok Nodai Alquran, Nodai Agama Islam.
- Faridl, M. (2003). Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia. *Jurnal Mimbar*, 19(2).
- Fatimah, K. (2018). Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?
- Hamzah, M. M. (2017). The Role and The Effect of Mui's Fatwa in The Current of Social-Culture Transformation in Indonesia. *Jurnal Millah*, 17(1).
- Harisudin, M. N. (2017). Islām wa fiqh Nusantara: al-Tanāfus 'alā al-huwīyah wa 'alāqat al-sulṭah wa al-ramz al-dīnī li jam'iyah Nahdlatul Ulama. *Studi Islamika*, 24(3).
- Hutabarat, D. C. (2017). Peneliti LIPI Nilai Kasus Ahok Hanya Manuver Politik.
- Izad, R. (2017). Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016). *PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 1(1).

- Kristianus. (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 87–101.
- Lova, C. (2016). Kasus Ahok dan Aksi Bela Islam Jadi Isu Terpopuler di Medsos 2016.
- Mahoney, L. M., & Tang. (2017). *Strategic Social Media: From Marketing to Social Change*. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons.
- Ming, C. (2017). Post-blasphemy ruling, Indonesia's reputation for pluralism takes a hit.
- Muh Kamim, A. B. (2017). Sikap Media Daring Dalam Kontestasi Pilkada DKI 2017 (Analisis terhadap Sikap Media Daring dalam Isu Dugaan Penghinaan Kitab Suci Al- Qur ' an oleh Cagub Ahok dalam Rentang Pemberitaan 5 Oktober S.D 20 Oktober 2016. *Jurnal komunikasi*, 11(2), 189–200.
- Muhtador, M. (2018). Pergulatan otoritas dan otoritarianisme dalam penafsiran (pembacaan hermeneutis khaled abou el fadl). *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1).
- Octaviani, A. S. P. dan G. (2017). Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2).
- Pamungkas, B. A., & Zuhroh, S. (2016). Pengaruh Promosi di Media Sosial dan Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Kedia Bontacos, Jombang). *Jurnal Komunikasi*, 10(2).
- Prasetyo, D. (2014). Persepsi Masyarakat DKI JAKARTA terhadap Figur dan Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama (AHOK). *Jurnal POLITIKA*, 5(2).
- Putri, C. S. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Cherie melalui Minat Beli. *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start - Up Bisnis*, 1(1).
- Rahmad. (2009). *Meraih Berkah dan Pahala Melalui Internet*. Jakarta: Elex Media.
- Saputra, E. (2016). Dampak Sosial Media terhadap Sikap melalui Pendidikan Agama Islam. *Jurnal SOSISO-E-KONS*, 8(2), 160–168.
- Soegiono, A. N., & Prakasita, A. W. (2018). *Pemerintahan Terbuka Pasca Ahok*. Surabaya.
- Sugiharto, B. A. (2016). Pengguna Internet di Indonesia Didominasi Anak Muda.
- Weintraub, A. N. (2011). *Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia*. New York: Reutledge.

- Wiktorowicz, Q. (2004). *Islamic Activism a Social Movement Theory Approach*. USA: North Morton Street.
- Yoyo. (2011). Teori dan Paradigma Penelitian Tentang Gerakan Fundamentalisme Islam di Timur Tengah. *Jurnal Kajian Islam*, 3(1).
- Zaeny, A. (2005). Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2).